

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau yang dikenal dengan teori agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang didefinisikan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (sebagai prinsipal) mengikat orang lain (sebagai agen) untuk melakukan kegiatan atas nama principal, dan principal memberi agen beberapa wewenang untuk mengambil keputusan (pendelegasian wewenang). Menurut Rankin, *et al.* (2017), teori agensi didefinisikan sebagai:

“teori untuk memahami hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang (*principal*) menggunakan jasa orang lain (*agent*) untuk melakukan aktivitas atas nama mereka, dan principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*.”

Hubungan antara *agent* dan *principal* dalam penelitian ini digambarkan sebagai hubungan antara pihak manajemen dan investor. Pihak investor sebagai *principal* posisinya sebagai penyandang dana perusahaan dan memiliki akses atau jangkauan terhadap informasi terkait internal suatu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang dilaporkan. Pihak manajemen sebagai *agent* ditempatkan sebagai pelaku atau berperan di dalam pelaksanaan operasional perusahaan serta memiliki akses atau jangkauan informasi yang berkaitan dengan operasional serta kinerja secara menyeluruh dan riil dari sebuah perusahaan. Dalam hubungan keagenan, kepentingan antara manajemen (*agent*) dan investor (*principal*) cenderung memaksimalkan utilitasnya sendiri. Selain itu, *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *principal* sehingga tidak selaras

antar satu sama lain. Ketidakselarasan ini disebut dengan konflik keagenan. Konflik keagenan ini didasari oleh adanya masalah *information asymmetry* (asimetri informasi) dan berakibat pada timbulnya risiko *fraud*. (Aviantara, 2021).

*Information asymmetry* merupakan suatu kondisi ketika *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibanding *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen selaku *agent* berkewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya kepada investor selaku *principal*. Namun, masalah yang timbul adalah ketika manajemen menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Manajemen yang memiliki informasi lebih ini memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan *fraud* (kecurangan) dengan memanipulasi laporan keuangan.

## **2.2. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)**

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan oleh Wells (2013) sebagai penyalahsajian yang dilakukan dengan sengaja atau menghilangkan jumlah atau penyingkapan dari laporan keuangan yang bertujuan untuk melakukan penipuan terhadap pengguna laporan keuangan terkhusus investor dan kreditur. *Association of Certified Fraud Examiners* (2018), mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai:

“suatu skema ketika seorang karyawan menyebabkan salah saji atau menghilangkan informasi yang material dalam laporan keuangan organisasi secara sengaja, misalnya: mencatat pendapatan fiktif, mengecilkan pengeluaran, atau menggelembungkan aset yang dilaporkan secara artifisial.”

Menurut *Black Law Dictionary* (8<sup>th</sup> Ed) *financial statement fraud* merupakan;

“suatu penyajian atau pernyataan salah yang ketidakbenarannya diketahui atau dibuat dengan ceroboh tanpa menyadari atau memperhatikan apakah laporan itu benar atau salah dan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh

kepada orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi orang tersebut.”

Berdasarkan ACFE *fraud tree*, *financial statement fraud* melibatkan lima skema yang berada di bawah subkategori, yaitu:

1. *Timing Differences (Improper Treatment of Sales)*

Pencatatan waktu transaksi yang tidak sesuai dengan waktu sebenarnya (menggeser pendapatan / beban antar satu periode dan periode berikutnya) untuk peningkatan/penurunan pendapatan sesuai keinginan pelaku.

2. *Fictitious Revenue (Fabricated Revenue)*

Pencatatan penjualan yang tidak pernah terjadi. Skema ini menghasilkan peningkatan pendapatan/laba atau bahkan aset.

3. *Concealed Liabilities and Expenses (Improper Recording of Liabilities)*

Menunda mencatat kewajiban pada bulan kedua belas tahun fiskal dan memindahkan pencatatan kewajiban pada bulan pertama tahun fiskal selanjutnya agar tahun yang berjalan, perusahaan terlihat hanya memiliki biaya yang kecil. Cara lainnya yaitu apabila perusahaan memiliki anak perusahaan, maka kewajiban tersebut dipindahkan ke anak perusahaan.

4. *Improper Asset Valuations*

Penilaian secara tidak wajar atau tidak sesuai dengan standar yang umumnya berlaku. Sebagian besar skema ini melibatkan penilaian yang berlebihan terhadap persediaan atau piutang.

5. *Improper Disclosures*

Menyembunyikan kecurangan yang terjadi dengan tidak melakukan pengungkapan yang cukup atas laporan keuangan.

### 2.2.1. Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Dalam mendeteksi potensi terjadinya *financial statement fraud*, penulis menggunakan indikator *income smoothing*. Perataan laba (*income smoothing*) merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba yang dilakukan dengan cara menggeser periode-periode antara pendapatan dan beban dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya fluktuasi dalam laba (Jusup, 2014). Perataan laba juga merupakan suatu teknik yang digunakan oleh manajer perusahaan untuk mengurangi perubahan jumlah laba yang dilaporkan dengan menggunakan perataan laba artifisial atau rill guna mencapai jumlah laba tertentu (Vakilifard & Allamehaeri, 2001).

Perataan laba dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dalam hal pelaporan eksternal. Investor cenderung akan lebih menyukai dan merasa aman apabila berinvestasi di perusahaan dengan laba yang stabil. Menurut Dascher & Malcom (1970), terdapat dua jenis *income smoothing* yaitu *real smoothing* dan *artificial smoothing*. *Real smoothing* merupakan perataan laba yang dilakukan melalui transaksi keuangan sesungguhnya melalui perubahan dengan sengaja atas kebijakan operasi dan waktunya. *Artificial smoothing* merupakan perataan laba yang mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan dengan memindahkan biaya dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang lain. Dalam penelitian ini, untuk mengukur perataan laba maka digunakan indeks eckel dengan formula sebagai berikut (Eckel, 1981):

$$\text{Indeks Eckel} = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$$

Keterangan:

$\Delta I$  = Perubahan laba dalam suatu periode

$\Delta S$  = Perubahan pendapatan dalam satu periode

CV = Koefisien variasi dari variabel

CV  $\Delta I$  dan CV  $\Delta S$  dapat dihitung sebagai berikut:

$$\sqrt{\frac{\sum(\Delta X - \bar{\Delta X})^2}{n - 1}} / \bar{\Delta X}$$

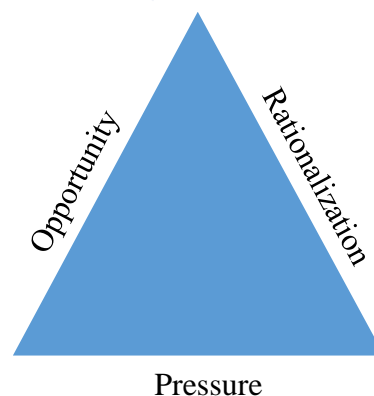
Kriteria dari indeks eckel adalah sebagai berikut:

- Nilai indeks > 1 tidak melakukan tindakan perataan laba
- Nilai indeks < 1 melakukan tindakan perataan laba

### 2.3. *Fraud Theory*

#### 2.3.1. *Fraud Triangle Theory*

Teori yang paling banyak dikenal adalah *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 250 orang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Illinois di Joliet selama 5 bulan ini menyimpulkan bahwa terdapat 3 kaki segitiga kecurangan yang digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Fraud Triangle**

Sumber: Cressey (1953)

1. Tekanan (*pressure*)

Cressey (1953) mendefinisikan tekanan sebagai masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan.

2. Peluang (*opportunity*)

Persespsi bahwa adanya kelemahan kontrol dan kecilnya kemungkinan untuk tertangkap. Dua komponen yang terkait dengan peluang adalah: *general information* dan *technical skill*.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi mengacu pada pola pikir tertentu oleh pelaku kecurangan yang memungkinkan mereka membenarkan tindakan yang dilakukan. Rasionalisasi merupakan faktor yang penting harus dimiliki untuk melakukan kecurangan. Namun, faktor ini sangat sulit untuk diidentifikasi karena sulit mengetahui pola pikir seseorang hanya berdasarkan data publik saja.

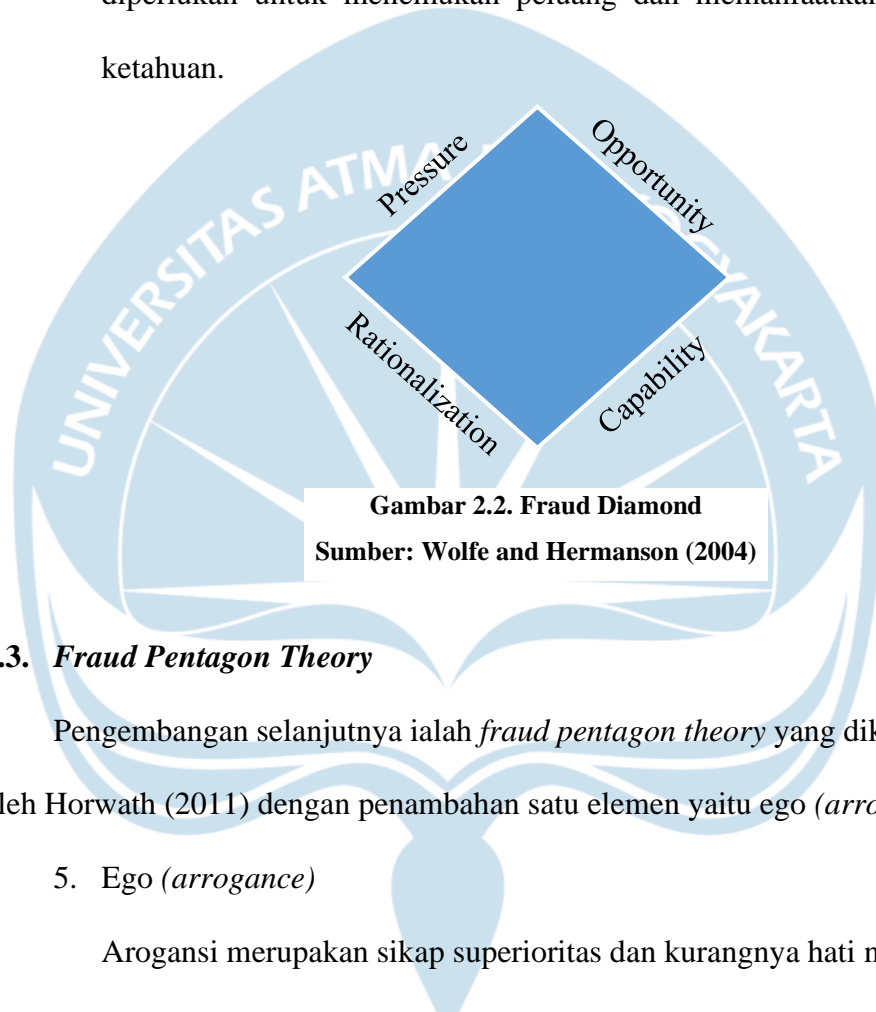
### **2.3.2. *Fraud Diamond Theory***

*Fraud diamond theory* merupakan pengembangan dari *fraud triangle theory* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini menambahkan satu elemen yaitu:

4. Kemampuan (*capability*)

Kemampuan merupakan sifat dan kemampuan pribadi individu yang memainkan peran utama dalam *fraud*. Wolfe & Hermanson (2004) menemukan bahwa *fraud* dengan kerugian yang besar tidak akan terjadi

tanpa adanya kemampuan yang dimiliki oleh *fraudster*. Peluang membuka pintu untuk kecurangan, tekanan dan rasionalisasi menarik *fraudster* lebih dekat ke pintu kecurangan, tetapi kemampuan diperlukan untuk menemukan peluang dan memanfaatkannya tanpa ketahuan.



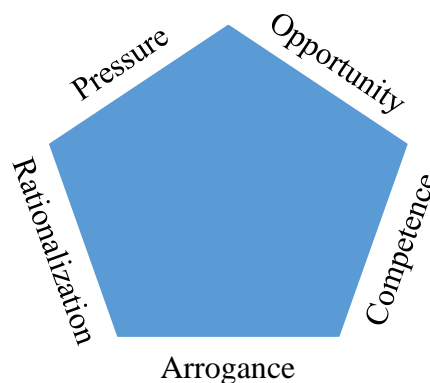
**Gambar 2.2. Fraud Diamond**  
Sumber: Wolfe and Hermanson (2004)

### 2.3.3. *Fraud Pentagon Theory*

Pengembangan selanjutnya ialah *fraud pentagon theory* yang dikemukakan oleh Horwath (2011) dengan penambahan satu elemen yaitu ego (*arrogance*).

#### 5. Ego (*arrogance*)

Arogansi merupakan sikap superioritas dan kurangnya hati nurani yang mempercayai bahwa pengendalian internal tidak berlaku padanya.



**Gambar 2.3. Fraud Pentagon**  
Sumber: Horwath (2011)

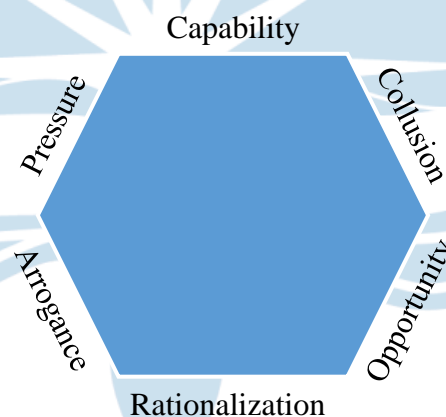
### 2.3.4. *Fraud Hexagon Theory*

Teori yang lebih dikenal dengan S.C.C.O.R.E model yang dikembangkan oleh Vousinas (2019) ini merupakan pengembangan dari teori terdahulu dengan penambahan elemen kolusi (*collusion*).

#### 6. Kolusi (*collusion*)

Kolusi adalah elemen penting dalam banyak kasus kecurangan yang kompleks, mahal, dan *white collar crimes*.

Sehingga, disimpulkan bahwa terdapat enam elemen yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu: *stimulus / pressure* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *ego* (arogansi).



**Gambar 2.4. Fraud Hexagon**

**Sumber: Vousinas (2019)**

## 2.4. *Fraud Hexagon Theory*

### 2.4.1. *Pressure / Stimulus (Tekanan)*

Shelton (2014) menjelaskan bahwa *pressure* dapat diartikan sebagai suatu motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*), yang biasanya disebabkan oleh beban keuangan. Terdapat empat (4) tipe



utama dari tekanan (*pressure*) yang dapat menyebabkan *financial statement fraud* menurut SAS No.9 dalam Skousen, et al. (2011), yaitu: *financial stability*, *external pressure*, *personal financial needs*, dan *financial targets*. Pada penelitian ini, faktor *pressure* (tekanan) diprosikan oleh *financial stability*.

*Financial stability* (stabilitas keuangan) merupakan gambaran dari kestabilan kondisi keuangan yang dapat dinilai melalui pertumbuhan finansialnya yang mencakup tingkat pertumbuhan aset, tingkat penjualan, maupun tingkat pertumbuhan laba perusahaan dari tahun ke tahun (Nurardi & Wijayanti, 2021). *Financial stability* merupakan tolak ukur kinerja perusahaan yang dinilai melalui pertumbuhan keuangan yang stabil. Kondisi keuangan perusahaan dianggap stabil apabila dapat memenuhi kebutuhan masa ini, masa yang akan datang, dan kebutuhan yang mendadak. Variabel *financial stability* akan di ukur dengan menggunakan rasio perubahan aset.

#### 2.4.2. *Opportunity* (Peluang)

*Opportunity* atau peluang merupakan situasi atau keadaan yang ada di entitas dimana terbukanya suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *fraud*. Pelaku kecurangan meyakini bahwa ia dapat melakukan tindakan kecurangan tanpa terdeteksi (Vousinas, 2019). Menurut Cressey (1953) terdapat dua komponen persepsi terhadap *opportunity*, yaitu:

1. *General Information*

Memiliki pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung atau memiliki *trust* (kepercayaan), dapat dilanggar tanpa konsekuensi.

2. *Technical Skill*

Sebuah keahlian, kemampuan, atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tindak kecurangan.

Pada penelitian ini, faktor *opportunity* (kesempatan) diproksikan oleh *ineffective monitoring*.

*Ineffective monitoring* (pemantauan yang tidak efektif) merupakan situasi dimana tidak efektifnya fungsi pengawasan yang terdapat di dalam organisasi yang terjadi sebagai dampak dari adanya dominasi manajemen dan pengendalian internal yang tidak efektif (AICPA, 2003). Organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, dan memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan berjalan adalah dewan komisaris (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Oleh sebab itu, variabel *ineffective monitoring* diukur dengan rasio dewan komisaris independen.

#### 2.4.3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

*Rationalization* merupakan pemikiran yang dimiliki pelaku kecurangan yang membenarkan perilaku kejahatan yang dilakukannya (Shelton, 2014). Rasionalisasi ini berperan penting dalam *fraud*, dimana seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan kecurangan namun akhirnya melakukan kecurangan karena memiliki pembenaran atas perilakunya yang tidak etis. Menurut Albrecht et al. (2018), berikut ini adalah beberapa rasionalisasi yang paling sering digunakan, yaitu:

1. Tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan
2. Ini dilakukan dengan tujuan yang baik

3. Setelah kesulitan keuangan ini teratasi, kami akan segera memperbaiki pembukuan
4. Dalam mengatasi hal ini, terdapat hal yang perlu dikorbankan – integritas atau reputasi

Menurut Skousen et al. (2011), variabel rasionalisasi merupakan hal yang sulit diukur karena tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti standar etika dan keyakinan seseorang hanya dengan menggunakan data publik. Pada penelitian ini, faktor *rationalization* diproksikan oleh *audit opinion*.

*Audit opinion* (opini audit) didefinisikan oleh Halim (2015) sebagai:

“kesimpulan atas kewajaran informasi yang telah diaudit. Laporan keuangan dapat dikatakan wajar apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran (*free from bias and dishonesty*) serta memiliki informasi yang lengkap (*full disclosure*)”

Menurut SPAP PSA 29 SA Seksi 508, terdapat 5 jenis pendapat auditor yaitu:

- 1) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- 2) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor baku (*unqualified opinion with explanatory language*)
- 3) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- 4) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
- 5) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Opini audit yang diberikan kepada suatu perusahaan amat penting karena akan digunakan sebagai bahan penilaian terhadap suatu perusahaan dan pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dalam

penelitian ini, variabel *audit opinion* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

#### 2.4.4. *Capability* (Kemampuan)

*Capability* merujuk pada sifat dan kemampuan pribadi seseorang dalam memerankan peran utama dalam melakukan *fraud* (Albrecht, et al. 2018). Dalam melakukan suatu *fraud*, individu harus dilengkapi dengan kemampuan dalam melihat celah sebagai suatu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan *fraud* (Indarto & Ghozali, 2016). Menurut Shelton (2014), *capability* (kemampuan) memiliki enam (6) ciri pendukung, yaitu:

1. *Positioning* artinya, berada dalam posisi yang tidak tersedia bagi orang lain, sehingga memungkinkan individu memanfaatkan peluang.
2. *Intelligence* artinya, individu cukup kreatif dan pintar untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan untuk meraih keuntungan bagi mereka.
3. *Ego / confidence* artinya, pelaku kecurangan memiliki kepercayaan diri pada kemampuan yang dimilikinya untuk tidak tertangkap.
4. *Coercion skill* artinya, individu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar turut membantu atau menyembunyikan kecurangan yang terjadi.
5. *Deceit / effective lying* artinya, pelaku kecurangan dapat membohongi atau melakukan pengalihan dengan meyakinkan.
6. *Stress Management* artinya, kemampuan pelaku kecurangan dalam mengelola stress karena telah merasakan stress terus menerus akibat melakukan dan menyembunyikan kecurangan.

Pada penelitian ini, faktor *capability* (kemampuan) diproksikan oleh *change in director*. Direktur merupakan otoritas utama untuk melakukan pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembentukan perseroan (Enterslice, 2021). *Change in director* (pergantian direksi) merupakan pemindahan wewenang dari direksi lama kepada direksi baru (Pamungkas & Utomo, 2018). Variabel *change in director* ini di ukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

#### 2.4.5. *Arrogance* (Ego)

*Arrogance* merupakan sikap dari kurangnya hati nurani yang merupakan sikap superioritas atau sikap keserakahan pada seseorang yang meyakini bahwa pengendalian internal tidak dapat diterapkan kepadanya (Horwath, 2011). Sikap sombong yang datang dari adanya kepercayaan bahwa individu merasa mampu melakukan *fraud* serta pengendalian tidak dapat diterapkan kepadanya, sehingga *fraudster* hanya akan berpikir keras untuk melakukan kecurangan, namun tidak memiliki ketakutan akan sanksi yang dapat menjratnya. Sikap sombong ini biasanya dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Pada penelitian ini, faktor *arrogance* diproksikan oleh *CEO duality*.

*CEO duality* merupakan suatu keadaan dimana seorang CEO memiliki lebih dari satu posisi di dalam perusahaan (Handoko & Aurelia, 2021). Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di Indonesia diterapkan *two tier system* dimana kewenangan pengurusan (direksi) dan kewenangan pengawasan (komisaris) dipisah pada organ yang berbeda (Sulaiman, 2015). Sehingga, khususnya di Indonesia variabel

*CEO duality* diukur dengan menggunakan sistem kekerabatan atau hubungan kekeluargaan antara dewan komisaris dan dewan direksi. Variabel *CEO duality* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

#### **2.4.6. Collusion (Kolusi)**

Istilah *collusion* (kolusi) menurut Vousinas (2019) mengacu pada:

“suatu persetujuan atau kesepakatan yang bersifat menipu diantara dua orang atau lebih, agar salah satu pihak melakukan perbuatan melawan pihak lain untuk suatu tujuan yang jahat, seperti untuk merampas hak pihak ketiga.”

*Fraud* dapat disembunyikan dengan cara kolusi antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga (AICPA, 2002). Pada penelitian ini, faktor *collusion* (kolusi) akan diprosikan oleh *state owned enterprise*.

*State owned enterprise* di Indonesia dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMN didefinisikan dalam UU No 19 tahun 2003 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMD dalam UU No 23 tahun 2014 didefinisikan sebagai sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Variabel *state owned enterprise* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*.

#### **2.5. Penelitian Terdahulu**

Penyusunan penelitian ini didasari oleh lima penelitian terdahulu yang dipilih penulis untuk dijadikan acuan. Penelitian pertama oleh Handoko & Tandean (2021) dengan judul *An Analysis of Fraud Hexagon in Detecting Financial Statement*

*Fraud (Empirical Study of Listed Banking Companies on Indonesia Stock Exchange for Period 2017-2019)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *change in director* dan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*.

Penelitian kedua oleh Handoko & Aurelia (2021) dengan judul *Fraud Hexagon Analysis for Detecting Potential Fraudulent Financial Reporting in Manufacture Sector*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial stability* dan *CEO duality* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *financial statement fraud* sementara *state owned enterprise* dan *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*.

Penelitian ketiga oleh Aviantara (2021) dengan judul *The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report* dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai subyek penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial stability* dan *director change* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*.

Penelitian keempat oleh Pamungkas & Utomo (2018) dengan judul *Fraudulent Financial Reporting: An Application of Fraud Pentagon Theory to Association of Southeast Asian Nations Corporate Governance Scorecard*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial stability*, *change of director*, dan *audit opinion* tidak berpengaruh terhadap *financial statement fraud*

Penelitian kelima oleh Hidayatullah & Praptoyo (2018) dengan judul *Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Analisis Fraud Triangle* dengan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2015 sebagai subyek penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *financial stability* dan



*ineffective monitoring* tidak berpengaruh dalam pendeteksian *financial statement fraud*.

**Tabel 2.1.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Handoko & Tandean (2021)	<i>An Analysis of Fraud Hexagon in Detecting Financial Statement Fraud (Empirical Study of Listed Banking Companies on Indonesia Stock Exchange for Period 2017-2019)</i>	<p><b>Variabel Independen:</b>  <math>X_1 = \text{Financial Target}</math>  <math>X_2 = \text{External Pressure}</math>  <math>X_3 = \text{Ineffective Monitoring}</math>  <math>X_4 = \text{Change in Auditor}</math>  <math>X_5 = \text{Change in Director}</math>  <math>X_6 = \text{Frequent Number of CEO's Picture}</math>  <math>X_7 = \text{Collaborates with Government Projects}</math></p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <math>Y = \text{Detecting Financial Statement Fraud}</math></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial target</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>External pressure</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Ineffective monitoring</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Change in auditor</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Change in director</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Frequent number of CEO's pictures</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>External pressure</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Collaborates with government project</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> </ol>
2.	Handoko & Aurelia (2021)	<i>Fraud Hexagon Analysis for Detecting Potential Fraudulent Financial Reporting in Manufacture Sector</i>	<p><b>Variabel Independen:</b>  <math>X_1 = \text{Financial Target}</math>  <math>X_2 = \text{Financial Stability}</math>  <math>X_3 = \text{Ineffective Monitoring}</math>  <math>X_4 = \text{Nature of Industry}</math>  <math>X_5 = \text{External Auditor Substitution}</math>  <math>X_6 = \text{Replacement of}</math></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Financial target</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></li> <li><i>Financial stability</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian</li> </ol>



			<p><i>Company Director</i>  <math>X_7 = \text{CEO Duality}</math>  <math>X_8 = \text{State Owned Enterprise}</math></p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <math>Y = \text{Detecting Fraudulent Financial Reporting}</math></p>	<p><i>financial statement fraud</i></p> <p>3. <i>Ineffective monitoring</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>4. <i>Nature of industry</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>5. <i>External auditor substitution</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>6. <i>Replacement of company director</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>7. <i>CEO duality</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>8. <i>State owned enterprise</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p>
3.	Aviantara (2021)	<i>The Association Between Fraud Hexagon and Government's Fraudulent Financial Report pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara)</i>	<p><b>Variabel Independen:</b>  <math>X_1 = \text{Financial stability}</math>  <math>X_2 = \text{Director Change}</math>  <math>X_3 = \text{Audit Fee}</math>  <math>X_4 = \text{E-Procurement}</math>  <math>X_5 = \text{Change in Audit Committee}</math>  <math>X_6 = \text{Whistleblowing System}</math>  <math>X_7 = \text{Government Ownership}</math>  <math>X_8 = \text{CEO Education}</math>  <math>X_9 = \text{CEO Military}</math></p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <math>Y = \text{Financial statement fraud}</math></p>	<p>1. <i>Financial stability</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>2. <i>Director change</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>3. <i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>4. <i>E-procurement</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>5. <i>Change in audit committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p>

				<p>6. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>7. <i>Government ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>8. <i>CEO education</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>9. <i>CEO military</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p>
4.	Pamungkas & Utomo (2018)	<i>Fraudulent Financial Reporting: An Application of Fraud Pentagon Theory to Association of Southeast Asian Nations Corporate Governance Scorecard</i>	<p><b>Variabel Independen:</b>  <math>X_1 = \text{Financial stability}</math>  <math>X_2 = \text{External pressure}</math>  <math>X_3 = \text{Financial target}</math>  <math>X_4 = \text{Nature of Industry}</math>  <math>X_5 = \text{Audit Opinion}</math>  <math>X_6 = \text{Substitution of The Board Directors}</math>  <math>X_7 = \text{Ownership by Management}</math></p> <p><b>Variabel Dependen:</b>  <math>Y = \text{Financial Statement Fraud}</math></p>	<p>1. <i>Financial stability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>2. <i>External pressure stability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>3. <i>Financial target stability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>4. <i>Nature of industry stability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>5. <i>Audit opinion</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>6. <i>Substitution of the board directors</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p> <p>7. <i>Ownership by management</i> tidak berpengaruh terhadap <i>financial statement fraud</i></p>
5.	Hidayatullah & Praptoyo, (2018)	Deteksi <i>Financial Statement Fraud</i> dengan Analisis <i>Fraud Triangle</i> pada perusahaan	<p><b>Variabel Independen:</b>  <math>X_1 = \text{Financial Stability}</math>  <math>X_2 = \text{Personal Financial Needs}</math></p>	<p>1. <i>Financial stability</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p>

	Perbankan yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015	$X_3 = \text{External Pressure}$ $X_4 = \text{Financial Targets}$ $X_5 = \text{Nature of Industry}$ $X_6 = \text{Ineffective Monitoring}$ $X_7 = \text{Change in Auditor}$  <b>Variabel Dependen:</b> $Y = \text{Financial Statement Fraud}$	<p>2. <i>Personal financial needs</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>3. <i>External pressure</i> berpengaruh positif terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>4. <i>Financial targets</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>5. <i>Nature of industry</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>6. <i>Ineffective monitoring</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p> <p>7. <i>Change in Auditor</i> tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>financial statement fraud</i></p>
--	--	---	--

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 2.6.1. Pengaruh *Financial Stability* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud*

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan tentu lebih mengharapkan kondisi keuangan selalu stabil, namun kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan SAS No. 99 dalam penelitian Skousen, et al. (2011), manajer akan mengalami tekanan untuk melakukan *financial statement fraud* guna meningkatkan prospek perusahaan dan memberi kesan pertumbuhan yang stabil apabila pertumbuhan suatu perusahaan di bawah rata-rata industri, dan terancam oleh kondisi (ekonomi, industri, atau operasi entitas) seperti:

1. Tingkat persaingan atau kejenuhan pasar yang tinggi serta menyempitnya margin.
2. Kerentanan yang tinggi terhadap adanya perubahan yang cepat seperti perubahan teknologi, produk yang usung, atau suku bunga.
3. Penurunan yang signifikan terhadap permintaan dan peningkatan kegagalan bisnis dalam industri maupun ekonomi secara keseluruhan.
4. Pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas yang tidak biasa.
5. Persyaratan akuntansi, undang-undang, atau peraturan baru dan yang sudah ada.
6. Penurunan kualitas aset.

Variabel *financial stability* menggunakan pengukuran rasio perubahan aset.

Aset merupakan bagian penting bagi perusahaan karena merupakan sumber ekonomi / kekayaan yang dapat memberi manfaat dimasa depan. Keberadaan aset juga menunjang kegiatan operasional perusahaan agar tetap berjalan. Aset bagi perusahaan perbankan menurut Bank Indonesia (2012) meliputi aset produktif (penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, dll) dan aset non produktif (agunan yang diambil alih, *suspense account*, dll). Karena aset digunakan untuk memperoleh penghasilan, maka bagi bank aset adalah suatu hal yang amat penting dan sangat menggambarkan kestabilan usaha, maka manajemen cenderung lebih-lebihkan aset perusahaan agar keuangan perusahaan terlihat stabil dan dapat menarik investor. Oleh sebab itu, digunakan rasio perubahan aset untuk mengukur *financial stability*. Semakin tinggi rasio

perubahan aset maka semakin tinggi pula potensi dilakukannya *financial statement fraud*.

Penelitian oleh Handoko & Aurelia (2021) dan Aviantara (2021) menyimpulkan bahwa *financial stability* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Sedangkan penelitian oleh Pamungkas & Utomo (2018) dan Hidayatullah & Praptoyo (2018) menyimpulkan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Dengan demikian, berdasarkan teori yang telah dipaparkan, adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu, serta situasi pandemi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = *Financial stability* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

#### **2.6.2. Pengaruh *Ineffective Monitoring* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud***

*Ineffective monitoring* merupakan situasi tidak efektifnya fungsi pengawasan dalam perusahaan (AICPA, 2003). Pengawasan yang tidak efektif dapat digunakan sebagai peluang oleh *fraudster* untuk melakukan *financial statement fraud*. Menurut SAS No. 99, *ineffective monitoring* terjadi dikarenakan:

1. Dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil tanpa kontrol kompensasi.
2. Tidak efektifnya pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal oleh pihak yang bertanggung jawab

*Ineffective monitoring* diukur menggunakan rasio dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim objektif, independent, serta memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Skousen et al. (2011), perusahaan yang melakukan kecurangan (*fraud*) secara konsisten memiliki lebih sedikit anggota dewan komisaris dari luar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan *fraud*. Jika rasio dewan komisaris semakin sedikit maka pengawasan semakin tidak efektif. Adanya pengawasan yang tidak efektif dapat dijadikan peluang oleh *fraudster* sebagai peluang untuk melakukan *financial statement fraud*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handoko & Aurelia (2021), Hidayatullah & Praptoyo (2018) dan Handoko & Tandean (2021) yang menyimpulkan bahwa *ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Kemudian, penelitian oleh Aviantara (2021) dengan pengukuran yang berbeda menyimpulkan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Dengan demikian, berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = *Ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

### **2.6.3. Pengaruh *Audit Opinion* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud***

*Audit opinion* memiliki peran penting bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan. Dalam membuat keputusan investasi, investor akan

mempertimbangkan banyak hal diantaranya laporan keuangan yang telah diaudit. Vermeer (2003) menjelaskan bahwa auditor eksternal lebih mentolerir usaha klien dalam mengelola labanya. Opini audit terkhususnya opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan merupakan bentuk rasionalisasi atau tolerir yang diberikan audit eksternal terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Alasan auditor memberikan tambahan paragraf penjas menurut Arens et al. (2016) adalah sebagai berikut:

1. Pengaplikasian yang tidak konsisten terhadap prinsip akuntansi
2. Keraguan substantial mengenai kelangsungan usaha (*going concern*)
3. Auditor menyetujui penyimpangan prinsip akuntansi
4. Penekanan terhadap suatu hal atau masalah tertentu
5. Laporan yang melibatkan auditor lain

Ketika mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraph penjas ini maka perusahaan merasa bahwa kecurangan yang dilakukannya adalah benar karena adanya toleransi yang diberikan oleh auditor. Karena perusahaan mendapatkan pembenaran atas perilaku yang dilakukan maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan terus melakukan keurangan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan *audit opinion* sebagai variabel independen adalah penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Utomo, (2018) yang menyimpulkan bahwa audit opinion tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Dengan demikian, dikarenakan kurangnya referensi mengenai *audit opinion*, maka hipotesis dirumuskan



berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan penalaran logis maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> = *Audit opinion* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

#### **2.6.4. Pengaruh *Change in Director* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud***

*Change in director* (pergantian direksi) merupakan pemindahan kewenangan yang berasal dari direksi lama kepada direksi yang baru dalam rangka membenahi kinerja direksi yang lama. (Pamungkas & Utomo, 2018). Perubahan direksi adalah dampak dari usaha yang dilakukan manajemen untuk memperbaiki output dari kinerja direksi terdahulu dengan melakukan perubahan struktur organisasi pada perusahaan atau dengan merekrut direksi baru yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dari direksi terdahulu. Namun, perubahan direksi tidak selamanya memberikan dampak positif bagi perusahaan.

Namun, menurut Wolfe & Hermanson (2004) pergantian direksi seringkali dipenuhi dengan muatan politis dan kepentingan pihak tertentu yang memicu terjadinya benturan kepentingan. Selain itu, penyesuaian yang dilakukan paska pergantian direksi menimbulkan kondisi instabilitas komando dan instabilitas pengendalian internal. Singkatnya, akan membawa perusahaan ke dalam *stress period* yang membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan untuk melakukan *financial statement fraud*.

Penelitian oleh Aviantara (2021) menyimpulkan bahwa *change in director* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Sementara



itu, penelitian oleh Handoko & Aurelia (2021), Handoko & Tandean (2021) dan Pamungkas & Utomo (2018) menyimpulkan bahwa *change in director* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Dengan demikian, berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aviantara (2021), maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> = *Change in director* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

#### **2.6.5. Pengaruh *CEO Duality* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud***

*CEO duality* yang menggambarkan dominasi kekuasaan dan pengaruh yang dapat menimbulkan sikap arogansi. *CEO duality* digambarkan dengan adanya hubungan kekerabatan antara dewan direksi dan komisaris yang ditandai dengan adanya hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini akan membuat seseorang merasa memiliki kekuasaan. Karena menyadari kekuasaan yang dimiliki, seorang pemimpin akan merasa kuat atau kebal terhadap kebijakan perusahaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin dengan kekuasaan yang besar menggunakan pengaruhnya untuk melakukan *financial statement fraud*.

Penelitian terdahulu yang menggunakan *CEO duality* sebagai variabel independen adalah penelitian yang dilakukan oleh Handoko & Aurelia (2021) yang menyimpulkan bahwa *CEO duality* berpengaruh positif terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan dan hasil penelitian terdahulu, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> = CEO duality berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

#### **2.6.6. Pengaruh *State Owned Enterprise* terhadap Potensi Terjadinya *Financial Statement Fraud***

*State owned enterprise* di Indonesia dikenal dengan BUMD dan BUMN dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Penyertaan modal ini membuat BUMD dan BUMN memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintah yang tentunya akan memberikan banyak keistimewaan dalam hal akses politik, keuangan dan sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Karena memiliki akses tertentu yang membawa kemudahan, hal ini cenderung membuat manajemen menerapkan tata kelola perusahaan yang kurang baik serta memungkinkan adanya penyimpangan yang dilakukan untuk tujuan politik. Hal ini membuka kemungkinan perusahaan melakukan *financial statement fraud*.

Halim Alamsyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pegawai mengatakan bahwa adanya kolusi yang terjadi dalam internal bank memicu kasus-kasus penggelapan dana nasabah. Kolusi internal ini terjadi karena adanya tiga faktor yakni lemahnya penerapan SOP, minimnya sistem informasi, serta SDM (Badudu, 2011). Penelitian terdahulu yang menggunakan *state owned enterprise* sebagai variabel independen dilakukan oleh (Handoko & Aurelia, 2021) yang menyimpulkan bahwa *state owned enterprise* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *financial statement fraud*. Dalam penelitian ini, hipotesis

dirumuskan berdasarkan teori yang telah dipaparkan serta penalaran logis penulis, sehingga perumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> = *State owned enterprise* berpengaruh positif terhadap potensi terjadinya *financial statement fraud***

